

PENGADILAN NEGERI TANGERANG

LAPORAN KEUANGAN

TAHUNAN T.A 2022

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2022
099077

JL. TMP TARUNA NO 7, TANGERANG

TANGERANG - BANTEN

Telp. (021) 5524157 Fax. (021) 5524158



**LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN T.A 2022
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
099077**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022
BAGIAN ANGGARAN 005.03
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

*JL. TMP TARUNA NO 7, TANGERANG
TANGERANG - BANTEN
Telp. (021) 5524157 Fax. (021) 5524158*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Tangerang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Tangerang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tangerang, Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Tangerang

H. ZULFIKAR ARIF RAHMAN PURBA, SH.,MM.
NIP. 197811091998031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. DASAR HUKUM	1
A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGADILAN NEGERI TANGERANG	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	4
A.5. Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai	14
B.3 Belanja Barang	14
B.4 Belanja Modal	15
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16
B.4.3 Belanja Modal Jaringan	16

B.4.4 Belanja Modal Lainnya.....	17
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	18
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	18
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>).....	18
C.3 Piutang Bukan Pajak	19
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak.....	19
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).....	20
C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	20
(TGR)	20
C.7 Persediaan	21
C.8 Persediaan Yang Belum Diregister.....	21
C.10 Peralatan dan Mesin.....	22
C.11 Gedung dan Bangunan.....	22
C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan	22
C.13 Aset Tetap Lainnya	23
C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan	23
C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	23
C.16 Piutang Tagihan TP/TGR.....	24
C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	24
C.18 Aset Tak Berwujud	24
C.19 Aset Lain–Lain.....	24
C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	25
C.21 Utang kepada Pihak Ketiga	25
C.22 Pendapatan Diterima di Muka	25
C.23 Uang Muka dari KPPN.....	26
C.24 Ekuitas	26
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	27
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	27

D.2 Beban Pegawai.....	27
D.3 Beban Persediaan	28
D.4 Beban Barang dan Jasa	28
D.5. Beban Pemeliharaan	29
D.6 Beban Perjalanan Dinas.....	29
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	29
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	30
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional.....	30
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	31
E.1 Ekuitas Awal	31
E.2 Defisit LO	31
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	31
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	31
E.5 Koreksi Lain-lain.....	31
E.6 Transaksi Antar Entitas	31
E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	32
E.6.2 Transfer keluar.....	32
E.7 Ekuitas Akhir.....	32
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	33
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	33
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	33
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	33

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021</i>	<i>vii</i>
<i>Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2022.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2022 dan 2021.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 17. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 30 Desember TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 18. Rincian Peny Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Desember TA 2022 ...</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 21. Rincian Persediaan</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 23. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 24. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 25. Perbandingan Rincian Pendapatan per 30 Desember TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>27</i>
<i>Tabel 26. Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 30 Desember TA 2022 dan TA 2021</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 27. Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 30 Desember TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 28. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Desember TA 2022 dan TA 2021</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 29. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Desember TA 2022 dan TA 2021</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 30. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Desember TA 2022 dan TA 2021</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 31. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 32. Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Desember TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 33. Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Desember TA 2022 dan TA 2021</i>	<i>30</i>

PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jl. TMP Taruna No. 7 Tangerang - 15118

Telp. 021-5524157 Fax. 021-5524158 e-mail : pn_tangerang@yahoo.co.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang Tahunan Tahun 2022 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tangerang, Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Tangerang

H. ZULFIKAR ARIF RAHMAN PURBA, SH.,MM.
NIP. 197811091998031002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang Tahunan Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Negara TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 242.369.500 atau mencapai 72,62% persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 333.754.000. Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp 334.402.750 atau mencapai 96,28 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 347.320.000.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	333.754.000	242.369.500	72,62%	345.187.000
Belanja Negara	347.320.000	334.402.750	96,28%	330.359.900

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp (104.816.755.516), yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 19.890.300,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0,00; Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp (104.836.645.816). Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp (104.836.645.816),00 dan Rp 19.890.300,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 242.369.500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 353.641.932,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 111.272.432), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar (Rp 0) dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit LO sebesar (Rp 111.272.432).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp 20.088.400,- ditambah defisit-LO sebesar (Rp 111.272.432,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 111.074.332 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai 19.890.300.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI TANGERANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2021
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	333.754.000	242.369.500	73	345.187.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		333.754.000	242.369.500	73	345.187.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	347.320.000	334.402.750	96	330.359.900
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara		347.320.000	334.402.750	96	330.359.900

NERACA

PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NERACA

PER 31 Desember 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 1.	(104.836.645.816)	0
Persediaan	C.1. 2.	19.890.300	20.088.400
Jumlah Aset Lancar		(104.816.755.516)	20.088.400
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		(104.816.755.516)	20.088.400
KEWAJIBAN			
C.5			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	(104.836.645.816)	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		(104.836.645.816)	0
Jumlah Kewajiban		(104.836.645.816)	0
EKUITAS			
C.6			
Ekuitas Dana Lancar			
Jumlah Ekuitas Dana		19.890.300	20.088.400
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		19.890.300	20.088.400

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

LAPORAN OPERASIONAL
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	242.369.500	345.187.000
Jumlah Pendapatan		242.369.500	345.187.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	160.158.182	149.948.321
Beban Barang dan Jasa	D. 4	105.703.250	112.181.900
Beban Pemeliharaan	D. 5	82.500	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	87.700.000	94.260.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		353.641.932	356.390.221
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(111.272.432)	(11.203.221)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			
Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(111.272.432)	(11.203.221)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI TANGERANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	E. 1	20.088.400	26.437.600
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(111.272.432)	(11.203.221)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	111.074.332	4.854.021
Ekuitas Akhir		19.890.300	20.088.400

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar

Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGADILAN NEGERI TANGERANG

*Profil dan
Kebijakan
Teknis Badan
Urusan
Administrasi*

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2022-2024 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015-2021 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2022-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tangerang

Visi Pengadilan Negeri Tangerang adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI YANG LUHUR DAN BERMARTABAT”, yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Tangerang menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara dengan adil.

Misi Pengadilan Negeri Tangerang :

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Tangerang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut :

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tangerang ;
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan ;
- 3) Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Tangerang ; dan
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Tangerang.

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung .

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Tangerang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Penyelesaian Perkara ;
- 2) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice);
- 3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ;
- 4) Peningkatan Kualitas Pengawasan ;
- 5) Peningkatan Tertib Administrasi Perkara ; dan
- 6) Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana ;

Pendekatan

Penyusunan

Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TAHUNAN Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akrual***A.4. Basis Akuntansi**

Badan Urusan Administrasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran***A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Urusan Administrasi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi***A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tahunan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Peradilan Umum. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan

(6) Kewajiban

Akuntansi

atas

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1 Pendapatan***Realisasi**Pendapatan**Rp 242.369.500*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 242.369.500 atau mencapai 73 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 333.754.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Negeri Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	420.000	570.000	135
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	27.150.000	15.640.000	57
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	86.730.000	92.480.000	106
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	219.454.000	133.679.500	60
	Total Pendapatan	248.495.000	208.400.000	72,62

Realisasi Pendapatan Negara TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 11.433.000 atau 3,31 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena:

1. Adanya penurunan Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan;
2. Adanya penurunan Pendapatan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan;
3. Adanya Penurunan Pendapatan Ongkos Perkara;
4. Adanya Penurunan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2022 dan TA 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	2021	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	570.000	1.180.00	0	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	15.640.000	22.880.000	7.240.000	(31,64)
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	92.480.000	102.670.000	(10.190.000)	(9,92)
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	133.679.500	218.457.000	(84.777.500)	(38,80)
	Total Pendapatan	242.369.500	345.187.000	(67.347.500)	(80,36)

Belanja

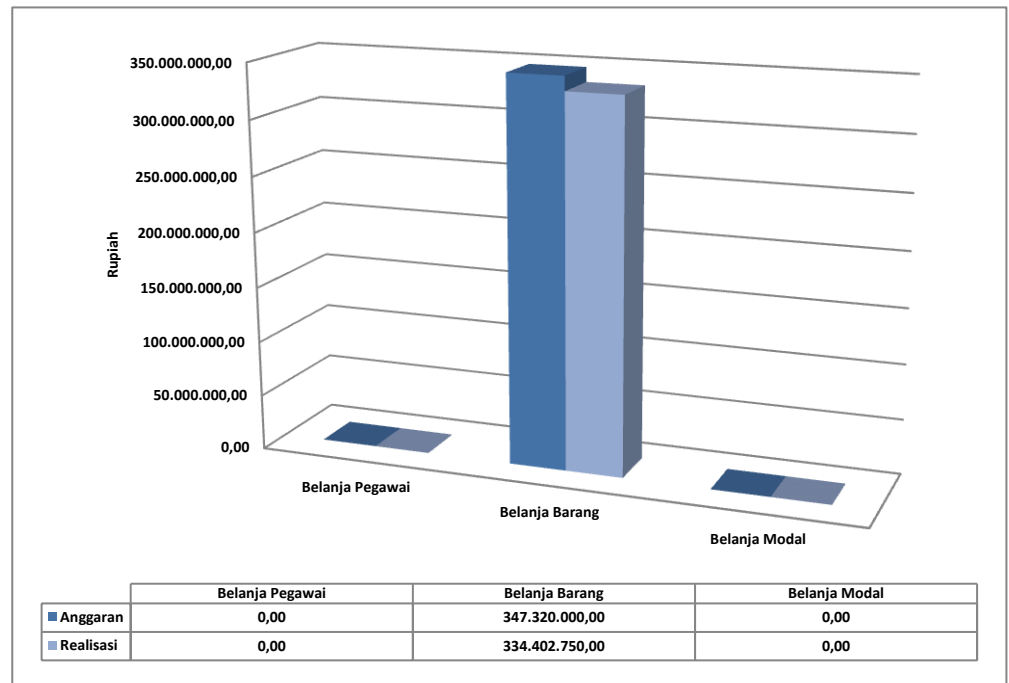
Realisasi
Belanja
Negara
Rp 334.402.750

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Tangerang per 31 Desember TA 2022 adalah sebesar Rp. 334.402.750,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 96% dari anggaran senilai Rp. 347.320.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	347.320.000	334.402.750	96.28
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	347.320.000	334.402.750	96.28
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	347.320.000	334.402.750	96.28

Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2022 & 2021

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	334.402.750	330.359.900	4.042.850	1.22
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	334.402.750	330.359.900	4.042.850	1.22

Realisasi Belanja Negara mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.042.850 atau sebesar 1.22 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena :

- 1) Adanya peningkatan pagu belanja barang dari tahun sebelumnya sehingga realisasi belanja barang pun ikut mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2022 ini.

Belanja
Pegawai
Rp 0

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.3 Belanja Barang

Belanja
Barang
Rp 334.402.750

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 334.402.750,00 dan Rp. 330.359.900,00. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,22 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan belanja barang operasional, Belanja Barang Non Operasional, dan Perjalanan Dinas pada Tahunan TA. 2022.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2022 dan TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	15.702.000	17.458.400	-1.756.400	-10%
Belanja Barang Non Operasional	56.401.250	61.003.500	-4.602.250	-8%
Belanja Barang Persediaan	140.999.500	123.678.000	17.321.500	14%
Belanja Jasa	33.600.000	33.600.000	33.600.000	0
Belanja Perjalanan Dinas	87.700.000	94.080.000	44.562.850	47%
Total Belanja Brutto	334.402.750	330.359.900	4.042.850	1%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	334.402.750	330.359.900	4.042.850	1%

Belanja
Modal
Rp 0,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
			Rp	%
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
			-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2022 dan TA 2021
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan			-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya			-	
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp
(104.836.645.816)

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 104.836.645.816 dan Rp 0,00. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo rekening RPL yang merupakan dana pihak ketiga dan dikelola oleh bagian kepaniteraan.

Tabel 9 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2022	31 Desember TA 2021
1.	Bank (RPL)	104.836.645.816	0
2.	Tunai Kas	0	0
3.	Kwitansi UP	0	0
Jumlah		104.836.645.816	0

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Tangerang per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Kuitansi yang belum di GU kan	Rp -
2	Di Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp -
3	Di rekening	Rp -
	Total	Rp -
	Ls Bendahara	Rp -
	Pajak	Rp -
	Pengembalian LS Remun	Rp -
Kas di Bendahara Pengeluaran		Rp -

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp 0,00

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 16. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	-	-	-
JUMLAH		-	-

C.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp 0,00

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00, terjadi penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Tabel 107. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
JUMLAH		-	-

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp 0,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 118. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2022

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Nihil					

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi
Rp 0,00

Bagian Lancar pada Badan Urusan Administrasi berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

**Tabel 19. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2020
1.	-	-	-
JUMLAH		-	-

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR)
Rp 0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan sebesar Rp 0,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

**Tabel 20 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
NIHIL					

C.7 Persediaan

Persediaan
Rp 19.890.300

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 19.890.300 dan Rp. 20.088.400.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Rincian Persediaan

No.	Uraian	30 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Barang Konsumsi	19.890.300	20.088.400
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		19.890.300	20.088.400

C.8 Persediaan Yang Belum Diregister

Persediaan yang
belum diregister
(Rp 0,00)

Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar (Rp 0,00) dan Rp0,00. Adapun rincian atas persediaan yang belum diregister adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Barang Konsumsi	-
2		-
Total		-

C.10 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp 0

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Desember 2022	0
Nilai Buku 31 Desember 2022	0

C.11 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp 0,00

Nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Desember 2022	0
Nilai Buku 31 Desember 2022	0

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp 0

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Desember 2022	0
Nilai Buku 31 Desember 2022	0

Aset Tetap Lainnya
Rp 0

C.13 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Desember 2022	0
Nilai Buku 31 Desember 2022	0

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp 0,00

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel dibawah:

Saldo per 31 Desember 2022	-
Perolehan KDP	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2022	-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp 0,00

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 13. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.16 Piutang Tagihan TP/TGR

Piutang Tagihan TP/TGR Rp 0,00 Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR Rp 0,00 **C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR**

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

C.18 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp 0,00 Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Badan Urusan Administrasi berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2022	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.19 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp 0,00 Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Badan Urusan Administrasi serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	-
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2022	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp 0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 14. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-Lain	-	-	-
Jumlah		-	-	-

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp 0,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 104.836.645.816 dan Rp 0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima
Dimuka Rp 0,00

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Jumlah
	NIHIL	

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang muka dari KPPN Rp 0
 Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.24 Ekuitas

Ekuitas Rp 19.890.300
 Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 19.890.300 dan Rp 20.088.400,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNPB
Rp 242.369.500

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 242.369.500,00 dan Rp 345.187.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 15. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	570.000	1.180.000	-52%
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	15.640.000	22.880.000	-32%
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	92.480.000	102.670.000	-10%
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	133.679.500	218.457.000	-39%
	Total Pendapatan	242.369.500	345.187.000	-30%

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 345.187.000 atau 30 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena:

1. Adanya penurunan Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan;
2. Adanya penurunan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan;
2. Adanya penurunan pendapatan Kejaksaan dan Peradilan yang sangat signifikan di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang;

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp 0

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 16. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*(dalam Rupiah)*

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Total Beban Pegawai				

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp 121.963.621,00*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 121.963.621,00 dan Rp 103.698.600,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 17. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*(dalam Rupiah)*

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	160.156.182	149.948.321	10.207.861	7%
Beban Barang dan Jasa	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	160.156.182	149.948.321	10.207.861	7%

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa Rp
105.703.250,00*

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 105.703.250,00 dan Rp 112.181.900,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 18. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*(dalam Rupiah)*

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15.702.000	17.458.400	-1.756.400	-10%
Beban Bahan	56.401.250	61.123.500	-4.722.250	-8%
Beban Jasa Konsultasn	33.600.000	33.600.000	0	0%
Total Beban Jasa	105.703.250	112.181.900	-6.478.650	-6%

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp 0,00

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 82.500 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	(72.000)	-	-
Total Beban Pemeliharaan	0	(72.000)	-	-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp 87.7000.000,00

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 87.700.000,00 dan Rp 94.260.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	87.700.000	94.260.000	(6.560.000)	6.95
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	87.700.000	94.260.000	(6.560.000)	6.95

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp 0,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat

0 ekonomi untuk Aset Tak berwujud.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi				

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp 0,00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Tabel 22. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp (111.272.432)

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(111.272.432)	356.390.221	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	(111.272.432)	356.390.221	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp 20.088.400*

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 20.088.400,00 dan Rp 26.437.600,00.

E.2 Defisit LO

*Defisit LO
Rp (111.272.432)*

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp (111.272.432) dan Rp (11.203.221). Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp 0,00*

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp 0,00*

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

*Koreksi lain-lain
Rp 0,00*

E.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Koreksi ini merupakan koreksi atas jurnal balik akrual yang telah dibuat per 31 Desember 2021.

No	Uraian	Jumlah
	Total	-

*Transaksi Antar
Entitas
Rp 111.074.332*

E.6 Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 111.074.332 dan Rp 4.854.021. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 34 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember 2022
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-242.369.500
Ditagihkan ke Entitas Lain	334.402.750
Transfer Masuk	19.041.082
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	111.074.332

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp (242.369.500) sedangkan DKEL sebesar Rp 334.402.750.

E.6.2 Transfer keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp 0. dari total Rp 0. yang diterima sepanjang tahun 2022. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, adalah Rp 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 19.890.300 dan Rp 20.088.400

Ekuitas Akhir
Rp 19.890.000

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2022 pada Pengadilan Negeri Tangerang yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2022.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut yang dapat dijabarkan pada TAHUNAN Tahun Anggaran 2022 ini.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Daftar Rekening Pemerintah

Terdapat beberapa rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tangerang diantaranya :

- a. BRI Cabang Tangerang A/C 0120-01-000284-30-3 a.n. BPg 127 PENGADILAN NEGERI TANGERANG yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.e0. Rekening sudah dibuka sesuai Surat Persetujuan Kuasa BUN Pusat No. S-1543/WPB.11/KP.127/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
- b. BRI Cabang Tangerang A/C 0120-01-001566-30-0 a.n. BPg 127 PENGADILAN NEGERI TANGERANG yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0. Rekening sudah dibuka sesuai Surat Persetujuan Kuasa BUN Pusat No. S-2482/MK.5/2009 tanggal 30 April 2009;
- c. BTN Cab. Tangerang A/C 00043-01-30-000860-1 a.n. RPL 127 Pengadilan Negeri Tangerang yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 625.618.447.837. Rekening sudah dibuka sesuai Surat Persetujuan Kuasa BUN Pusat No. S-664/MK.5/2014 tanggal 03 Februari 2014. Dengan rincian per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut :
 - 1) Biaya Perkara sebesar Rp. 6.021.544.221
 - 2) Biaya Eksekusi sebesar Rp. 29.423.656.714
 - 3) Biaya Konsinyasi sebesar Rp. 590.099.295.643
 - 4) Uang Titipan Perkara Pidana sebesar Rp.0

2. DIPA

DIPA pada Pengadilan Negeri Tangerang Tahun Anggaran 2022 dengan nomor : SP DIPA-005.03-2.099077/2022 tanggal 17 November 2021 berjumlah sebesar Rp 347.320.000,00 (Tiga Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. DIPA Awal

Kode	Uraian / Kegiatan	Semula (Rp)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
1049.AEA	Koordinasi	10.000.000
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	300.960.000
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33.600.000
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	2.760.000
	Total	<u>347.320.000</u>

3. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/454/KP.10.10/2/2022 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Staf Pengelola Administrasi Keuangan pada Kantor Pengadilan Negeri Tangerang maka pada tanggal 18 April 2022 telah dilakukan Perubahan Penunjukkan Pengelola Administrasi Keuangan, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: H. ZULFIKAR ARIF RAHMAN PURBA, S.H.,MM.
Pejabat Pembuat Komitmen	: DESSY HERLIANI, S.SOS
Pejabat Penandatanganan / Penguji SPM	: BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, ST., MH.
Bendahara Pengeluaran	: MUHAMAD TOUFAN PUTRA PRATAMA, SE.
Bendahara Penerimaan (PNBP)	: NIRMALIA ANGGRAINI, S.H.
Staf Pengeola Administrasi Keuangan	1. MAYA KARTIKA LAKSMIWATI, S.E 2. ADHI FIRZIA MIHRAM 3. MARBUNGA ROPITA SIMANULLANG, Amd. Ak

